



SKPD Diminta Selesaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu

PONTIANAK, SP - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengingatkan agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyelesaikan laporan keuangan mereka tepat waktu.

Ia menegaskan, tidak ingin ada hal-hal yang tidak beres dengan laporan keu-

angan tersebut. Jika sampai terjadi, maka akan ada sanksi tegas yang diberikan.

"Saya ingatkan supaya laporan keuangan masing-masing SKPD selesai tepat waktu. Saat saudara menyelesaikan laporan keuangannya, ketika diaudit banyak hal, saya sesuai dengan pakta integritas yang ditandata-

ngani tidak segan untuk bertindak," kata Midji.

"Selain itu, wartawan jangan tulis saya mengancam dong, karena itu sesuai dengan yang tertulis dalam pakta integritas," lanjutnya lagi.

Midji kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur dalam pengunaan anggaran di masing-

masing SKPD, selama itu berjalan sesuai dengan ketentuan dan koridor yang berlaku.

"Saya tidak akan ganggu, tapi juga tak mau dengar lagi ada sekian persen dipotong dari anggaran itu, karena staf pasti tahu, staf pasti ngomong dan saya tahu. Makanya tak usah, laksanakan saja semuanya. Saudara jalankan saja

• **Baca Halaman 15**



Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji



Hal 9 ■ **skpd diminta**

APBD itu sesuai dengan porsi-nya dan transparan,” pintanya.

Saat ini, lanjut Midji, semua informasi sudah seharusnya terbuka, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing SKPD yang mestinya diumumkan kepada masyarakat, mengenai keper-untukkannya.

“*Ndak* ada yang perlu ditutupi. Sebenarnya yang ada di RKA itu yang penting-penting. Waktu saya jadi walikota, saya umumkan di koran, mengenai apa saja program tahun depan. Ini bertujuan agar masyarakat ikut turut mengawasi,” katanya.

Untuk diketahui, fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah mengejar ketertinggalan dalam segala hal. Oleh karena itu, semua target yang telah ditetapkan tersebut harus bisa direalisasikan.

“Kita harus mengejar ke-

tertinggalan dalam segala hal, target- target itu harus dicapai, karena bagaimana pun masyarakat akan lihat masa pemerintahan kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan harusnya menjadi kenangan dari kita untuk masyarakat. Jangan tiap hari kita kena *beleter orang*,” ungkap Midji.

Sebelumnya, Anggota VI BPK RI Dr Harry Azhar Azis mengatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), pihaknya masih menemukan beberapa permasalahan administrasi yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Adapun beberapa permasalahan administrasi tersebut, diantaranya, pengelolaan persediaan Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya tertib, kemudian pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat kurang memadai,” katanya di Pontianak,

beberapa waktu lalu.

Selain itu, lanjutnya, Penatausahaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kalimantan Barat belum tertib,

Harry menjelaskan, peran strategis BPK dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Dalam hal ini, BPK ditugaskan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga keuangan Negara dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu, kami mengapresiasi beberapa indikator fundamental pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan

Barat seperti tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan jimirasio yang lebih baik dibandingkan dengan indeks rata-rata nasional,” katanya.

Namun, dirinya juga mengingatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat tiga tahun terakhir di bawah rata-rata nasional.

Untuk itu diharapkan Pemprov Kalbar melakukan upaya strategis untuk meningkatkan IPM yang lebih tinggi dari pada rata-rata nasional.

Selain itu, menurutnya, inflasi Pemprov Kalbar masih lebih tinggi dari pada rata-rata Nasional dan pendapatan perkapita masyarakat Kalbar lebih rendah dibanding Nasional.

“Jika hal-hal diatas tidak diperbaiki, tentu pencapaian opini WTP ini akan sia-sia, jika kesejahteraan rakyat belum tercapai,” katanya. **(nak/ant/bob)**